DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA

TAHUN

2025

Command Dompu

diskominfo.dompu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024 ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024.

Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi yang telah disepakati bersama.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan renja ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusuanan pada masa mendatang. Pada kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya serta membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024 dengan harapan semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dompu.

Dompu, 17 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dompu

PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Yani Hartono, Sp
Pembina Utama Tk I (IV/b)
NIP. 197006222000031002

DAFTAR ISI

Penetapan Kinerja Tahun 2025	……	I
Kata Pengantar	……	Ii
Daftar Isi	……	Iii
BAB I PENDAHULUAN	……	1
1.1 Latar Belakang	……	1
1.2 Landasan Hukum	……	2
1.3 Maksud dan Tujuan	……	4
1.4 Sistematika Penulisan	……	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024	……	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan Capaian Renstra	……	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	……	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD	……	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	……	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	……	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	……	32
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	……	32
3.2 Program dan Kegiatan Tahun 2025	……	35
BAB IV PENUTUP	……	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2021–2026 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Dompu serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai acuan dalam Penyelengaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari ren

cana strategis. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sedang bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, atau sering disebut sebagai E-Government. Tantangan besar dalam implementasi E-Government terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di wilayah daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1958 NOMOR 122, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Dompu tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyelenggraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
15. Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
16. Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
17. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas-dinas Daerah.
18. Peraturan Bupati Dompu Nomor 46 Tahun 2023 tentang Dompu Satu Data
19. Peraturan Bupati Dompu Nomor 18 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024-2028
20. Peraturan Bupati Dompu Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
21. Peraturan Bupati Dompu Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerapan Sistin Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yaitu mengembangakan sistem komunikasi dan informatika yang efektif, Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Dompu, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan**.**

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu juga digunakan sebagai dasar penyususunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Mengembangkan Sistem Komunikasi dan Informatika: Membangun infrastruktur TIK yang modern dan efektif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Membuat informasi publik lebih mudah diakses dan memperkuat pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2025

Memuat informasi tentang Evaluasi pelasanaan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, pemerintah daerah mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas komunikasi dan Informatika dalam menyelenggaraan tugas dan fungsinya, Analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi dan penelaahan usulan Program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dilanjutkan dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi dan misinya. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran.

Bab IV. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan perkiraan maju tahun 2025, serta catatan dan harapan untuk kemajuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2025 serta untuk mengetahui Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja direncanakan sesuai target kinerja dalam RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 didasarkan pada perubahan RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026 guna mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah
3. Kebijkan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu telah melaksanakan 5 Program dengan 11 Kegiatan, dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No		Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
				Belanja	%
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.926.409.751**	**3.652.694.794**	**93**
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.401.650	29.366.650	100
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.401.650	29.401.650	100
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.039.396.335	2.769.637.660	91
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.599.050	382.428.905	99
		- Penyedian peralatan dan perlengkapan Kantor - Penyedia peralatan rumah tangga - Penyedia bahan logistik kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.903.000 8.152.000 38.819.000 41.005.050 259.720.000	37.882.000 3.971.000 38.819.000 40.962.050 256.613.855	100 100 100 100 99
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Belanja Modal)	82.440.840	82.353.500	100
		- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	82.440.840	82.440.840	100
	5.	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	350.366.876	349.737.826	98
		- Penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	14.400.000	13.930.950	97
		- Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.390.000	7.230.000	98
		- Penyedia jasa pelayanan Umum kantor	328.576.876	328.576.876	100
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	39.205.000	39.170.253	96
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	32.005.000	39.170.253	122
2		**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**653.532.950**	**653.523.800**	**99**
	1.	Pengeloaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/kota	508.532.950	913.483.460	99
		- Pelnyebarluasan Informasi Publik	59.532.950	59.532.800	99
		- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	594.000.000	594.000.000	100

3		**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**269.217834**	**268.294.872**	**99**
	1.	pengeloaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kab/kota	10.000.000	10.000.000	100
		- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penelenggaraan Pemda/Kab/Kota	10.000.000	10.000.000	100
	2.	Pengelolaan E-Goverment di lingkup pemda/kab/kota	259.217.834	258.294.872	99
		- Penatalaksanaan dan Pengawasan E-goverment dalam Penyelenggaraan Pemda/kab/kota	19.619.900	19.619.900	100
		- Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	239.597.934	238.674.972	99
4		**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah daerah/Kab/Kota**	**152.131.500**	**152.089.500**	**99**
	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	152.131.500	152.089.500	99
		- Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral	55.291.500	55.249.500	99
		- Pengembangan Infrastruktur	96.840.000	96.840.000	100
5		**Program Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**34.958.700**	**34.947.650**	**99**
	1.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah/Kab/Kota	34.958.700	34.947.650	99
		- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kab/Kota	34.958.700	34.947.650	99

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Adapun Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu pada Tahun 2024 dapat kami sampaikan Sebagai Berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi kinerja	Capaian Kinerja
1	Mewujudkan Dompu Menjadi Kabupaten Smart City	Terwujudnya Dompu menjadi Kabupaten dengan E-Govermen yang berkualitas	Indeks SPBE	2,5 (point)	2.52 (point)	100.8%
		Meningkatnya Akses Informasi Dan Komunikasi Publik yang Berbasis Elektronik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 %	92.20%	122.93 %
		Tersedianya Satu Data yang Terintegrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2	2.75%	137.5%
		Menigkatnya Keamanan Sistem Persandian	Persentase Tingkat Keamanan dan Kemudahan Informasi Daerah	60%	65 %	108%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024:

1. Terwujudnya Dompu Menjadi E-Goverment yang berkualitas dengan Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan target Kinerja sebesar 2.5 point dan dan terealisasi sebesar 2.52 point artinya telah melampaui target karena pada Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo telah sampai pada tahap yaitu:
   a. Regulasi SPBE Kab. Dompu yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE
   b. Tersedianya Layanan Dasar TIK

c. Perbup Arsitektur SPBE Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Arsitektru SPBE
d. Perbup Peta Rencana SPBE Kabupaten Dompu 19 Tahun 2024 Tentang Peta Rencana SPBE
e. Perbup Aplikasi SRIKANDI Di Kabupaten Dompu
f. Terselenggaranya Pelaporan Anggaran Keuangan Desa Melalui Aplikasi SESKEUDES dengan fasilitas VPN
g. Tersedianya Website Portal Satu Data Kabupaten Dompu
h. Pemanfaatan Seluruh Aplikasi Umum (8 Aplikasi)
i. Tersedianya Portal Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan berbasis Website (E-Sakip)
j. Adanya SK Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Dompu
k. Seluruh Layanan dasar IT pada Layanan Internal Pemerintah tetap terlayani melalui Infrastruktur IT Dinas Kominfo.

   Adapaun layanan dasar yaitu:
   - Layanan Sub Domain ada 3 layanan
   - Layanan Hosting/ruang data aplikasi ada 3 layanan
   - Layanan Email Istansi (email Resmi OPD/ASN ada 25 OPD termasuk email Resmi PJS Bupati Dompu Penunjang TTE ada 1 layanan
   - Layanan aduan IT yaitu permohonan pengaduan
l. Dampak Insiden Serangan Ransomewere pada PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) menjadikan server cloud dompu sebagai server utama untuk recorvery dan backup insiden tsb dan S4 Subdomain dan website OPD dimigrasi/dipindahkan dari PSNA 2 ke cloud dompu

   Keterangan: hingga pada saat ini masih terkendala tingkat keamanan dan kestabilannya sebagai dampak dari insiden serangan hacker/virus ransomewere.
m. Pemanfaatan jaringan Virtual Privat Network (VPN) tetap berlangsung lancar hingga saat ini ada 72 Bendahahara Desa tetap lapor obline melalui aplikasi siskeudes BPKP
n. Untuk melayani kebutuhan DISDUKCAPIL guna “berbagipakai Data” NIK pada seluruh OPD Dinas Kominfo telah siap secara infrastruktur, tinggal menunggu prosedur administrasi dari DISDUKCAPIL atas Implementasinya.

o. Kegiatan penyelenggaran jaringan intra Pemerintah target penyediaan layanan internet oleh pemda kab. Dompu sementara ini nihil terkendala pencairan anggaran.

2. Meningkatnya Akses Informasi dan Komunikasi Publik yang berbasis Elektronik dengan Indikator Kinerja Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dengan target 75% dan terealisasi sebesar 92.20% artinya telah melampaui terget karena Bidang Infomasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo telah sampai pada tahap yaitu:
   a. Bimtek pemuktahiran daftar informasi dan dokumentasi publik (PPID) bagi seluruh anggota OPD
   b. Bimtek pemuktahiran PPID Kelurahan/Desa
   c. Sosialisasi SP4N-LAPOR untuk Perangkat Daerah, Kecamatan desan dan Kelurahan
   d. Sosialisasi SP4N-LAPOR untuk Stockholder, LSM dan Masyarakat
   e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Provinsi NTB
   f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Desa
   g. Visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi NTB
   h. Meraih penghargaan/anugerah sebagai Kabupaten Informatif Tahun 2024 berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi NTB Nomor : 04/KEP/KI-NTB/X/2024 Tentang Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Publik Provinsi NTB dan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024.
   i. Workshop PPID untuk seluruh PPID OPD
3. Tersedianya Satu Data yang Terintegrasi dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target sebesar 2 point dan terealisasi sebesar 2.75 point artinya telah melampaui terget karena pada Bidang Statistik Dinas Kominfo telah sampai pada tahap yaitu:
   a. Pembinaan dan screening EPSS
   b. Penilaian Tim Internal
   c. sosialisasi Perbub satu Data
   d. Bimtek Operator Produsen Data

e. Persiapan Penilaian TPB dengan BPS
f. Penilaian TPB Interview
g. Bidang Statistik Sektoral telah melakukan Visitasi Penilaian EPSS Tingkat Kabupaten
h. Melakukan Visitasi Penilaian EPSS Tingkat Provinsi
i. Program Pengelolaan Statistik Sektoral memperoleh Nilai IPS di tingkat pusat Sebesar 2.75 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-638/1000/ES/2024
j. Lokakarya Portal Dompu Satu Data
k. Launching Portal Dompu Satu Data
l. Evaluasi Portal Dompu Satu Data

Keterangan : *Terdapat perubahan indikator dari persentase Integrasi data daerah menjadi indeks pembangunan statistik karena persentase integrasi data daerah sudah temuat dalam indeks pembangunan statistik (IPS). IPS sendiri tiap tahun dilakukan penilaian atau monev langsung dari Pemerintah Provinsi dengan tiga tahap penilaian yaitu penilaian internal dinas (TPI), penilaian Kabupaten (TPK) dan penilaian Badan (TPB) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan objek Pengembangan Statistik di Kabupaten Dompu*

4. Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian dengan Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kaamanan dan Kemudahan Informasi Daerah pada triwulan III dengan target sebesar 40% dan terealisasi sebesar 50% artinya telah mencapai Targer karena Bidang Persandian Dinas Kominfo telah sampai pada tahap:
   a. masih dalam proses pengajuan permohonan asistensi Indeks KAMI ke BSSN dengan surat Nomor : 800/55/Diskominfo/2024 dan masih dalam Proses pengesahan Penyusunan Perbup TTE pada Bagian Hukum SETTDA Kabupaten Dompu.
   b. Bidang Persandian Telah selesai ditetapkan dan telah terbentuk Peraturan Bupati Tanda Tangan Elektronik (TTE) Nomor 27 Tahun 2024 tentang penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
   c. Sosialisasi TTE tiap OPD
   d. Penetapan TTE untuk kepala OPD

Keterangan: *dalam penerapan TTE pada OPD terkendala karena kepala OPD banyak yang pensiun dan dimutasi sehingga harus dilakukan perubahan data kepada OPD untuk diusulkan kembali ke BSRE*.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dompu, terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat atau mendorong kinerja serta efisiensi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendorong diantaranya adalah sebagai berikut:

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Kurangnya jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dapat menghambat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

   Masalah jaringan internet yang belum merata atau infrastruktur teknologi yang tidak memadai dapat menghambat komunikasi dan penyebaran informasi yang efisien.

3. Anggaran Yang Terbatas

   Keterbatasan dana atau anggaran dalam anggaran daerah dapat membatasi pengembangan layanan serta pemeliharaan sistem yang ada.

4. Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat yang Rendah

   Rendahnya tingkat literasi teknologi informasi di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat menghambat penyebaran informasi dan layanan berbasis teknologi.

5. Regulasi yang Kurang Mendukung

   Ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan lokal atau kurangnya peraturan yang mendukung efisiensi kerja dapat menjadi kendala dalam pelayanan.

Faktor Pendorong:

1. Perkembangan Teknologi Informasi

   Kemajuan teknologi, seperti penyebaran internet dan perangkat komunikasi yang lebih baik, dapat mendorong peningkatan layanan publik yang lebih efisien dan cepat.

2. Dukungan Pemerintah Daerah

   Kebijakan yang proaktif dari pemerintah daerah dalam hal alokasi anggaran dan peraturan yang mendukung dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Peningkatan SDM

   Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah yang lebih baik dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan.

4. Partisipasi Masyarakat

   Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempercepat tercapainya tujuan pelayanan yang lebih baik.

5. Penggunaan Sistem Informasi Terintegrasi

   Implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis digital, seperti e-government, dapat mempermudah akses informasi dan mempercepat proses pelayanan.

6. Keterbukaan dan Transparansi

   Peningkatan keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelayanan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memudahkan akses layanan publik.

   Dengan mengoptimalkan faktor pendorong dan meminimalisir faktor penghambat, pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu mempunyai Tugas Pokok dan Fingsi sebagia berikut:

Tugas Pokok:

Membantu Bupati Dompu dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Fungsi:

- Merumuskan kebijakan lingkup Komunikasi dan Infomatika
- Pelaksanaan kebijakan lingkup Komunikasi dan Infomatika
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Komunikasi dan Infomatika
- Pelaksanaan Administrasi Dinas lingkup Komunikasi dan Infomatika
- Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan – permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor yang mempengaruhinya bisa dilihat dalam tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
1	Program Informasi dan Komuniasi Publik			
a.	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab Dompu	Kurangnya Efektivitas dalam Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	a. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat c. Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Optimal d. Pengelolaan Media Sosial yang Belum Maksimal e. Minimnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten f. Keterbatasan Anggaran	a. Keterbatasan Infrastruktur b. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan c. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah. d. Manajemen dan Sistem Informasi yang Tidak Terintegrasi e. Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Media Sosial f. Resistensi terhadap Perubahan

No.	PROGRAM / KEGIATAN	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
b.	Pengelolaan e-goverment di lingkup pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam implementasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik.	a. integrasi Sistem yang Tidak Optimal b. Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur c. Kurangnya Kompetensi SDM d. Keamanan Data dan Privasi e. Anggaran dan Pembiayaan yang Terbatas f. Tantangan Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan e-Government atau tidak sesuai dengan kebijakan nasional, serta kurangnya pedoman yang jelas untuk penerapan teknologi informasi di tingkat daerah.	a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM. b. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK c. Keterbatasan Anggaran d. Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah e. Budaya dan Mentalitas yang Tidak Mendukung Transformasi Digital
2	Program Aplikasi Informatika			
	Pengelolaan nama domain dan sub domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu	Pengelolaan yang tidak optimal bisa berdampak pada sistem informasi dan pelayanan publik yang kurang efisien.	a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampi b. Infrastruktur Teknologi yang Kurang Memadai c. Kurangnya Pemahaman tentang Kebijakan Pengelolaan Domain d. Keterbatasan	a. Keterlambatan atau kegagalan dalam pemanfaatan domain b. Keamanan Sistem yang Rentan c. Kebingungan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Domain d. Tidak Terpenuhinya Standar Pemerintah Pusat
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup pemerintah derah Kabupaten/ kota	kurangnya kualitas dan integrasi data statistik yang akurat dan relevan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan,	a. Ketidakterpaduan dan Fragmentasi Data b. Kualitas Data yang Rendah c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas. d. Kurangnya Standarisasi dan Pedoman yang. e. Keterbatasan Anggaran. f. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman tentang Pentingnya Statistik Sektoral g. Kesulitan dalam Pengumpulan	a. Keterbatasan Kapasitas SDM b. Sistem Pengelolaan Data yang Belum Terintegrasi. c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Informasi d. Minimnya Komitmen dari Pihak Terkait e. Budaya Kerja yang Tidak Berorientasi pada Data f. Keterbatasan Anggaran dan Prioritas Pemerintah Daerah

No.	PROGRAM / KEGIATAN	POKOK MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
		dan evaluasi program pembangunan daerah.	Data di Wilayah Terpencil	
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
	1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kurangnya sistem komunikasi yang aman, terstruktur, dan efektif	a. Keamanan dan Kerahasiaan Informasi b. Kurangnya Standarisasi Protokol Komunikas c. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi d. Minimnya Pelatihan dan Pengetahuan SDM e. Ketidakjelasan Koordinasi dan Tanggung Jawab	a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) b. Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur c. Kurangnya Kebijakan atau Regulasi yang Jelas d. Kurangnya Kesadaran dan Komitmen terhadap Keamanan Data

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

Review atau telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisi kebutuhan proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD. Adapun tabel Reviw terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN DOMPU

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 4.735.945.094	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Rencana Tahun 2025	
					Target 2024	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif
								Nasional	Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						5.036.250.735					5.412.627.846
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai				80 point	3.926.409.751				85 point	4.716.774.796
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Ketentuan				79,6 point	29.401.650				85 point	41.364.650
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah Yang Tersusun Sesuai Ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen		29.401.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	7 Dokumen	41.364.650
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase Laporan	100%	100%	100%	100%	3.039.396.335				100%	3.914.168.146

	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah YangTersusun sesuai Ketentuan										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	12 Bulan	2.971.449.335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	3.821.865.146
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terealisasinya anggaran SKPD	100%	100%	100%	12 Buan	67.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terealisasinya anggaran SKPD		92.303.000
Administrasi UmumPerangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	385.599.050				100%	278.592.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Waktu Terpenuhinya	100%	100%	100%	12 Bulan	37.903.000	Dana Transfer		Penguatan Tata Kelola	12 Bulan	28.331.000

Kantor	Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	100%	100%	12 Bulan	8.152.000			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	7.462.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100%	12 Bulan	38.819.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan Daerah	12 Bulan	29.979.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	12 Bulan	41.005.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	18.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	80 Kali	259.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan TataKelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja	80 Kali	194.570.000

									pembangunan daerah		
Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	82.440.840				100%	83.020.000
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Terpenuhinya kebuutuhan Belanja Modal	100%	100%	100%	2 Unit	82.440.840			Penguatan TataKelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	1 Unit	83.020.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	350.366.876				100%	333.130.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	100%	100%	100%	12 Bulan	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	13.200.000

Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa dan perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	12 Bulan	7.390.000			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	8.530.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Terpenuhiny a Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	12 Bulan	328.576.876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	12 Bulan	311.400.000
Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	39.205.000				100%	66.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	15 Kendara an Dinas	32.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan TataKelola Pemerintahan untuk mendukung kinerja pembangunan daerah	15 Kendaraan Dinas	31.500.000
Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan		-	-	-	-	-					35.000.000

Bangunan Lainnya											
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	85%	63%	63%	65%	653.532.950				70%	418.860.000
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	78%	80%	80%	653.532.950				85%	418.860.000
Pelayanan InformasiPublik		100%	100%	100%		59.532.950	PAD		publik	100%	58.860.000

Pelayanan InformasiPublik	Jumlah Pengaduan Pd Layanan Aplikasi LAPOR SP4N Yg Terselesaikan Persentase layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	100%	100%		59.532.950	PAD		Publik	100%	58.860.000
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kerjasama Media Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kab Dompu	100%	100%	100%	Kerjasama Media Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kab Dompu	594.000.000	PAD		Meningkatkan Jumlah Kerjasama Dengan Media massa	Jumlah Kerjasama Media Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kab Dompu	360.000.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penyelenggaraan SPBE	90%	73%	83%	65%	269.217.834				81,00%	210.320.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Persentase PD yang menggunakan domain Dompukab.go.id	100%	30%	30%	50%	10.000.000			Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	65%	2.000.000

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	50%	50%	52%	259.217.834				61%	208.320.000
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	1 Kebijakan	19.619.900	PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma siPelayanan Publik	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	2 Kebijakan	16.320.000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	85%	80%	80%	60%	239.597.934	PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma siPelayanan	Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	52%	192.000.000

								Publik			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						152.131.500					44.980.050
PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraa n Satu Data Kabupaten Dompu	100%	100%	100%	0,00%	152.131.500				40,00%	44.980.050
Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	0%	152.131.500				76%	44.980.050
Peningkatan Kapasitas Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	100%	100%	100%	50%	55.291.500	PAD		Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	7 Kegiatan	38.980.050
Pengembangan Infrastktur	Peningkatan Infrastrktur Statistik	100%	100%	100%	2 Kegiatan	96.840.000	PAD		Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	2 Kegiatan	6.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						34.958.700					
PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Tingkat	80%	0%	40%	40%	34.958.700				50%	21.693.000

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Keamanan dan Kemudahan Informasi Daerah										
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi SandiAntar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Regulasi	100%	100%	100%	100%	34.958.700				100%	21.693.000
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	31%	1	1	2 %	34.958.700	PAD		Peningkatan kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kualitas layanan publik	33%	21.693.000
Total						5.036.250.735					5.412.627.846

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Melalui forum konsultasi tersebut diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitik beratkan pada aspek teknokratis. Oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademisi/ perguruan tinggi, LSM dan OPD di Provinsi. Dari hasil forum konsultasi tersebut, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada pelayanan publik di sektor- sektor pembangunan

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi usulan – usulan program/kegiatan dari masyarakat;
b. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
c. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besarnya volume kegiatan;
d. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD;
e. Memeriksa usulan program/kegiatan sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
f. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan.

Kamus usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu

No	Isu/Bidang Urusan	Program	Usulan Permasalahan	Satuan	Persyaratan Usulan	Masyarakat	OPD Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1 Komunikasi dan Informatika	1 Program Aplikasi Informatika	1 Pemasangan Wifi diarea public	Unit	a. Memberikan surat permohonan/proposal b. Tersedia Ruang untuk fasilitas pembelajarandaring bagi pelajar c. Sudah terjangkau jaringan Fiber Optik dariDinas Komunikasi dan Informatika d. Tersedia jaringan listrik e. Keamanan terjamin f. Foto/Dokumentasi; Titik Koordinat	Masyarakat	Dinas Komunikasidan Informatika
			2 Penyediaan Fasilitas Layanan TIK Publik (Coworking-Space)	Paket	a. Terdaftar keanggotan suatukomunitas (IT,bisnis,seni dll) b. Memahami pengoperasian komputer c. Membawa laptop sendiri	Masyarakat	Dinas Komunikasidan Informatika
			3 Peningkatan literasidigital masyarakat	Paket	a. Sertifikasi Keahlian dari produsen/penulis b. Dapat berbentuk Artikel, E-book, Slide c. Berupa Individu/perorangan/group/kelompok	Masyarakat	Dinas Komunikasidan Informatika

		Komunikasi dan Informatika	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1	Layanan penghubung aspirasi warga Kabupaten Dompu kepada Bupati Mojokerto melalui media online (LAPOR-SP4N)	Pengaduan	1. Layanan aspirasi/pengaduan online melalui :.lapor.go.id/Instagram/FB/WA 2. Ruang lingkup pengaduan :Wilayah Kabupaten Dompu	Masyarakat	Dinas Komunikasidan Informatika
					2	Layanan panggilan darurat (call centre) Kabupaten Dompu	Nomor emegency yang terhubung	a. Nomor yang disambungkan merupakan nomor emergency yang meliputi kejadian: • Kebakaran • Kerusuhan • Kecelakaan • Bencana alam • Penanganan masalah kesehatan • Gangguan keamanan dan ketertiban umum dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.		
					3	Publikasi Informasi dan Dokumentasi masyarakat terkait potensi daerah melalui media komunikasi publik daerah	Potensi daerah yang terpublikasikan	a. Obyek yang dipubliakasikan merupakan potensi daerah b. Memiliki surat ijin usaha/surat keterangan usaha c. Obyek yang dipublikasikan minimal aktif beroperasi dalam 3 bulan terakhir d. Foto/dokumentasi kegiatan usaha	Masyarakat	

					4	Pembentukan dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	a. Memiliki SK Pembentukan KIM dari Kepala Desa b. Setiap KIM diharapkan memiliki website untuk mempublikasikan potensi desanya c. Website KIM diharapkan kedepannya terkoneksi pada website Dinas kominfo Kabupaten Dompu		
3		Komunikasi dan Informatika		Program Keamanan Data dan Informasi	1	Pelatihan/Sosialisasi bagi Pemerintah Desa	Kegiatan	a. Memiliki alat (media Komunikasi) b. Dapat mengoperasikan/menggunakan alat komunikasi c. Memiliki Paket Data/jaringan Wifi	Masyarakat	
4		Statistik sektoral		Program pengawasan Menara Telekomunikasi		Aplikasi Telekomunikasi (SITELE)	Unit	a. Sign Up (Daftar) b. Login c. Data-data Perusahaan d. Permohonan e. Retribusi f. Lokasi Menara (bangun baru ataupun perpanjangan)	Masyarakat	
				Program Penyelenggaran Statistik Sektoral		Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang bersifat terbuka	Data	a. Data statistik sektoral bisa diakses melalui portal resmi data sektoral dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu b. Data statistik sektoral berdasarkan kamus data statistik sektoral Kab. Dompu	Masyarakat	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

❖ **Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu adalah "Mewujudkan Layanan Komunikasi dan Informasi yang handal dan berdaya saing di Kabupaten Dompu", maka tujuan, sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.
2. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
3. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.
4. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta Pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan Literasi dan Profesionalisme.

Pada dasarnya tujuan dari misi tersebut adalah ***Meningkatnya Pelayanan di Bidang Komunikasi dan Informatika***.

Adapun Tujuan yang yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu adalah :

1. Mewujudkan Kabupaten Dompu menjadi Kabupaten Smart City.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

❖ **Sasaran**

Merupakan suatu target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan beberapa Sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Terwujud Dompu menjadi Kabupaten dengan E-Goverment yang berkualitas
2. Meningkatnya Akses Informasi Dan Komunikasi Publik yang Berbasis Elektronik
3. Tersedianya Satu Data yang Terintegrasi
4. Menigkatnya Keamanan Sistem Persandian
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.1.1
Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Dompu menjadi Kabuapten dengan E-Govermen yang berkualitas	Indeks SPBE	Rasio Nilai dari Index SPBE	Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu	Bidang Aplikasi Informatika
2	Meningkatnya Akses Informasi Dan Komunikasi Publik yang Berbasis Elektronik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Rasio Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP)	Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3	Tersedianya Satu Data yang Terintegrasi	Persentase Integrasi Data Daerah	Rasio Nilai dari Indeks Pembangunan Statistik	Laporan Hasil Kegiatan Semester	Bidang Statistik Sektoral
4	Menigkatnya Keamanan Sistem Persandian	Persentase Tingkat Keamanan dan Kemudahan Informasi Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan TTD Elektronik	Laporan Hasil kegiatan dan penilaian publik	Bidang persandian
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Jumlah Nilai SAKIP OPD	Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Infrmatika Kabupaten Dompu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu juga telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1(satu) tahun. RKT 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA 2025
1	Mewujudkan Dompu Menjadi Kabupaten Smart City	Terwujudnya Dompu Menjadi E-Government yang Berkualitas	Indeks SPBE	point	3
		Meningkatnya akses informasi dan komunikasi publik yang berbasis elektronik	Tingkat Keterbukaan Informasi publik	%	85
		Tersedianya satu data yang terintegrasi	Persentase Integrasi Data Daereh	%	90
		Menigkatnya keamanan sistem persandian	Persentase tingkat keamanan dan kemudahan informasi daerah	%	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	%	84.37

Rencana Kerja Tahunan 2025 pada table di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indeks SPBE dengan Target Kinerja akhir sebesar 3 (Tiga) point
- Jumlah Tingkat Keterbukaan Informasi Publik dengan Terget 85%
- Persentase Integrasi Data Daerah dengan Target Kinerja sebesar 90%
- Jumlah Tingkat Keamanan dan Kemudahan Informasi Daerah dengan target 70%
- Jumlah Tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan target 84.37%

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Komunikasi dan Informatika perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang real. Berikut Rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025.

Tabel 3.2.1.
Rencana Program / Kegiatan Sekretariat dan Bidang-bidang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025

1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer
	Belanja makanan dan minuman rapat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
	Administrasi Umum perangkat daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
	Belanja alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat listrik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu
	Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Belanja Modal mebel
	Belanja modal alat pendingin
	Belanja modal peralatan studio audio
	Belanja modal peralatan studio, video dan film
	Belanja modal personel komputer
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Belanja Kawat/ faximili/internet/ tv berlangganan
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin
	Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraann Perorangan Dinas/ Kendararaan Dinas Jabatan
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor beroda dua
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut/-Alat Angkut darat bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor- peorangan
	Pemeliharaan/ rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Penyebarluasan Informasi Publik
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan-Alat Tulis kantor

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
	Makan Minum Rapat
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
	Penyelenggaraan Hubungan Masyaraka, Media dan Kemintraan Komunitas
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota
	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE Di Lingkup Pemerintah Daerah
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-souvenir/cendera
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, moderator, pembawa acara

	Belanja Jasa Penyelenggara Acara
	Pengembangan Infrastruktur
	Belanja Jasa Tenaga Ahli
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	Operasional Jaring Komunikasi Sandi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Tabel 3.2.2.
RUMUSAN RENCANA DAN PROGRAM TAHUN 2025

NO	URAIAN URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**41.364.650**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**41.364.650**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	15.502.650
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	Terpenuhinya bahan cetak	8.822.650
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	Terpenuhinya bahan Komputer	9.020.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya bahan aktivitas lapangan	8.020.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**278.592.000**
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor		**28.331.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	18.157.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Terpenuhinya Benda Pos	3.000.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Terpenuhinya Bahan Komputer	7.174.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		**57.462.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Terpenuhinya Perabot Kantor	4.888.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-alat Listrik	Terpenuhinya alat listrik	2.574.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		**29.979.000**
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat	7.175.000
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Tamu	16.984.000
	Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan	Belanja Makanan dan Minuman aktivitas lapangan	5.820.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**18.250.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor –bahan cetak	Terpenuhinya Alat bahan cetak	18.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**194.570.000**
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	131.180.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.390.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**83.020.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**83.020.000**
	Belanja Modal mebel	Terpenuhinya Modal mebel	**8.900.000**
	Belanja Modal Alat Pendingin	Terpenuhinya Belanja Modal Alat Pendingin	**20.000.000**

	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Terpenuhinya Belanja Modal Peralatan Studio Audio	**7.770.000**
	Belanja modal Peralatan Studio video dan film	Terpenuhinya Belanja modal Peralatan Studio video dan film	**11.500.000**
	Belanja Modal Personal Komputer	Terpenuhinya Belanja Modal Personal Komputer	**34.850.000**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**333.130.000**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		**13.200.000**
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan/	Terpenuhinya Belanja Internet Kantor	13.200.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**8.530.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Terpenuhinya Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Terpenuhinya Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	3.650.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**311.400.000**
	Belanja jasa Tenaga Administrasi	Terpenuhinya Belanja jasa Tenaga Administrasi	232.800.000
	Belanja jasa Tenaga Kebersihan	Terpenuhinya jasa Tenaga Kebersihan	7.200.000
	Belanja jasa Tenaga IT	Terpenuhinya jasa Tenaga IT	71.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**66.500.000**
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		**31.500.000**
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Dinas Bermotor beroda dua	Terpenuhinya Pemeliharaan Kenadaraan Bemotor Dinas beroda dua	9.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Perorangan	Terpenuhinya kendaraan Bermotor perorangan	22.500.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		**35.000.000**
	Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	Terpenuhinya Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	35.000.000
2	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**418.860.000**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		418.860.000
	Penyebarluasan Informasi Publik		**58.860.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- alat tulis kantor	Terpenuhinya Belanja alat tulis kantor	2.788.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	Terpenuhinya Belanja bahan cetak	2.710.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	Terpenuhinya belanja bahan komputer	3.267.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya Makanan dan minuman rapat	11.395.000

	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Terpenuhinya Kebutuhan Naraasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Terpenuhinya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	31.200.000
	Belanja jasa penyelenggara acara	Terpenuhinya penyelenggaraan acara	2.000.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		**360.000.000**
	Belanja Jasa Iklan/reklame/film dan pemotretan	Terpenuhinya Belanja Jasa Iklan/reklame/film dan pemotretan	125.000.000
	Belanja Langgana Jurnal/surat kabar/majalah	Terpenuhinya Belanja Langgana Jurnal/surat kabar/majalah	235.00.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**210.230.000**
	Pengeloaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**2.000.000**
	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**2.000.000**
	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	Terpenuhinya Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000
	Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**208.320.000**
	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemda		**16.320.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	2.278.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan cetak	Terpenuhinya Bahan cetak	700.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Terpenuhinya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.148.000
	Belanja makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya Belanja makanan dan Minuman Rapat	2.594.000
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretaris pelasaksana kegiatan	terpenuhinya Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretaris pelasaksana kegiatan	7.600.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		**192.000.000**
	Belanja kawat/faximili/internet/TV Berlangganan	Terpenuhinya Belanja kawat/faximili/internet/TV Berlangganan	192.000.000
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**44.980.050**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**44.980.050**
	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		**38.980.050**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	5.753.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	Terpenuhinya bahan cetak	2.088.050
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	Terpenuhinya bahan komputer	3.609.000
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-souvenir/cendera	Terpenuhinya Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-souvenir/cendera	1000.000
	Belanja makanan dan minuman rapat	Terpenuhinya makan dan minum rapat	10.980.000
	Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	Terlaksananya pelaksanaaan kegiatan	2.900.000

	Honorarium Narasumber/pembahas, moderator	Terpenuhinya Honorarium Narasumber/pembahas, moderator	4.250.000
	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	Terpenuhinya Belanja Jasa Penyelenggara Acara	8.400.000
	Pengembangan Infrastruktur		**6.000.000**
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Terpenuhinya Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**21.693.000**
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		**21.693.000**
	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		**21.693.000**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.122.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	Terpenuhinya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan cetak	2.446.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	Terpenuhinya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan komputer	6.087.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Terpenuhinya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.038.000
Total			**5.412.627.846**

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2024. Semua usulan program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Selain itu, Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu ini, maka sasaran pembangunan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah tergambar dan tercatat dengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Dapat disimpulkan bahwa Realisasi APBD Tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja Operasional sebesar RP. 5.036.250.735 dan realisasi belanja modal sebesar 95%, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu mendapat Alokasi Anggaran untuk Belanja Program sebesar RP. 541.627.846 yang terdiri dari 5 Program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Aplikasi Informatika, Program Penyelenggara Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Komuniaksi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik dan saran yang dapat membantu penyempurnaannya di masa yang akan datang. Terlepas dari itu semua, kami juga berharap bahwa seluruh program kerja yang ada dalam Rencana Kerja ini akan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Dompu, 17 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dompu

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Yani Hartono, Sp
Pembina Utama Tk I (IV/b)
NIP. 197006222000031002

Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

Gedung Paruga Parenta
Jl. Beringin No. 01 Gedung Paruga Parenta Lantai 03
Telp. (0373) Fax 2723944
Kode Pos 84213 Website: diskominfo.dompukab.go.id

"Terciptanya pelayanan public yang handal dengan teknologi komunikasi informatika yang berbasis elektronik menuju Kabupaten Dompu smart city"